



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	24 (dua puluh empat)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) beserta seluruh Direksi Holding dan Subholding PT Pertamina (Persero).
Hari, Tanggal	:	Kamis, 8 September 2022
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang dilanjutkan oleh Martin Manurung, S.E., M.A./ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmi, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Produksi atau Lifting Minyak, 2. Pengelolaan Minyak dan Kapasitas Kilang Minyak, dan 3. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hadir	:	1. 40 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Saudara Nicke Widyawati; 3. Beserta seluruh Direksi Holding dan Subholding PT Pertamina (Persero); dan jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada pukul 16.39 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 8 September 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara tepat sasaran melalui mekanisme-mekanisme pembatasan serta pengawasan secara ketat termasuk penegakan hukum dan optimalisasi penerapan teknologi informasi.
2. Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menerbitkan regulasi yang mengatur kriteria penerima BBM bersubsidi (revisi Perpres No. 191 Tahun 2014 Jo Perpres No.117 Tahun 2021).
3. Komisi VI DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) untuk menyiapkan dan mengimplementasikan strategi mitigasi risiko guna mengantisipasi fluktuasi harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.
4. Komisi VI DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan proyek pengolahan minyak (kilang minyak) termasuk penerapan strategi-strategi untuk menarik investasi di sektor pengolahan minyak.
5. Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) untuk mempercepat implementasi skema penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada kelompok nelayan dan petani melalui skema "Solar Untuk Koperasi Nelayan" secara menyeluruh termasuk mengembangkannya untuk petani dan UMKM.
6. Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) untuk terus melakukan efisiensi biaya dalam rangka mereformulasi harga BBM yang lebih kompetitif.
7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Pertamina (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan :

Komisi VI DPR RI meminta data perbandingan atas formulasi harga BBM yang saat ini diterapkan oleh PT Pertamina (Persero); perbandingan formulasi dan skema Petral dengan ISC Pertamina; rincian biaya pokok produksi dengan berbagai skenario harga WTI dan ICP; rincian biaya pokok produksi *crude oil* domestik dan impor; dan rincian impor *crude oil*, LPG, LNG 2011-2022 (termasuk kuota per bulan dan dari negara mana saja).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 19.48 WIB.

**DIREKTUR UTAMA
PT PERTAMINA (PERSERO)**

Ttd.

NICKE WIDYAWATI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.

A-352